

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SUAKA POLITIK KEPADA EVO MORALES
OLEH MEKSIKO TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN**Reka khorisma¹, Dista Aulia.Y², Dyanzah Aji Hapto³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun

Email : emaseptaria@unib.ac.id, miadepio@unib.ac.id**ABSTRAK**

Krisis politik yang melanda Bolivia pada tahun 2019 berujung pada pengunduran diri Presiden Evo Morales dan pemberian suaka politik oleh Pemerintah Meksiko. Tindakan Meksiko ini menjadi sorotan dunia internasional, baik dari segi politik maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales, dengan fokus pada aspek legalitas berdasarkan hukum internasional dan dasar kemanusiaan yang digunakan dalam keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), memberikan landasan hukum bagi suaka politik yang diberikan kepada Morales. Pemberian suaka politik oleh Meksiko kepada Evo Morales juga berkaitan dengan prinsip kekebalan diplomatik, terutama jika perlindungan diberikan di dalam kedutaan Meksiko. Dalam hukum internasional, sebuah kedutaan dianggap memiliki kekebalan, artinya aparat negara lain, termasuk negara tempat kedutaan berada, tidak bisa masuk atau melakukan penangkapan di sana. Meski Morales bukan diplomat, selama ia berada di dalam kedutaan, ia tetap terlindungi oleh aturan ini. Jadi, tindakan Meksiko bukan hanya sah secara hukum dan moral, tetapi juga dilindungi oleh aturan tentang kekebalan diplomatik, selama digunakan dengan tujuan kemanusiaan dan bukan untuk menyembunyikan pelaku kejahatan serius. Kata Kunci: suaka politik, hukum internasional, hak asasi manusia, Deklarasi Universal HAM, Bolivia, Meksiko

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Krisis politik yang terjadi di Bolivia pada tahun 2019, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Evo Morales, menyoroti berbagai aspek hukum internasional, khususnya terkait dengan hukum diplomatik dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan Meksiko untuk memberikan suaka politik kepada Evo Morales setelah pengunduran dirinya merupakan tindakan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum diplomatik. Kasus ini memperlihatkan bagaimana negara-

negara menggunakan hak dan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada individu yang dianggap mengalami ancaman politik di negaranya sendiri¹. Fenomena pengasingan dan pemberian suaka politik kepada seorang mantan kepala negara bukanlah hal baru dalam sejarah hubungan internasional. Namun, dalam kasus Evo Morales, isu ini menjadi semakin kompleks karena terjadi dalam konteks ketidakstabilan politik Bolivia yang melibatkan tuduhan kecurangan pemilu, tekanan dari pihak oposisi, serta keterlibatan militer dalam pengunduran dirinya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran hukum diplomatik dalam memberikan perlindungan kepada individu yang mengklaim dirinya sebagai korban kudeta².

Dampak dari pengasingan dan pemberian suaka politik terhadap Evo Morales tidak hanya berimplikasi pada hubungan diplomatik antara Bolivia dan Meksiko, tetapi juga terhadap stabilitas politik di Bolivia itu sendiri. Keputusan Morales untuk menerima suaka politik di Meksiko memicu respons beragam dari berbagai aktor internasional, termasuk dukungan dari negara-negara yang memiliki afiliasi ideologis dengannya serta kecaman dari pihak-pihak yang menilai bahwa Morales seharusnya menghadapi proses hukum di negaranya sendiri. Dalam kajian hukum diplomatik, kasus ini menyoroti berbagai isu hukum yang relevan, seperti prinsip non-refoulement, hak negara untuk memberikan suaka, serta batasan-batasan hukum internasional dalam menangani pengasingan politik. Meksiko, sebagai negara yang memberikan suaka, mendasarkan keputusannya pada prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman politik³. Di sisi lain, Bolivia, setelah pergantian kepemimpinan, memiliki kepentingan untuk membawa Morales kembali ke negaranya untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum selama masa pemerintahannya.

Dalam perspektif hukum internasional, pemberian suaka politik diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 serta praktik hukum kebiasaan internasional. Pemberian suaka kepada Morales dapat dikaji dalam konteks ketentuan hukum ini, khususnya mengenai apakah Morales memenuhi kriteria sebagai individu yang berhak atas perlindungan internasional ataukah keputusan tersebut lebih bersifat politis dibandingkan yuridis. Urgensi kajian mengenai analisis hukum diplomatik dalam kasus ini menjadi penting mengingat bahwa fenomena serupa dapat terjadi di masa depan, terutama dalam konteks negara-negara dengan sistem politik yang masih rentan terhadap ketidakstabilan. Studi ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana hukum diplomatik beroperasi dalam kasus pengasingan politik serta sejauh mana negara-negara dapat menggunakan hak prerogatifnya dalam memberikan perlindungan kepada individu tertentu⁴.

¹ Clément, B. (2019). The Role of the Organization of American States in Latin American Politics. *Latin American Politics and Society*, 61(2), 1-22.

² Finkel, A., & High, D. (2017). Human Rights and Political Asylum in Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 49(4), 883-905.

³ Malkin, E. (2019). Evo Morales's Resignation: A Crisis in Bolivia. *The New York Times*.

⁴ Ruhl, C. H. (2018). The Political and Legal Dynamics of Asylum in Latin America. *Latin American Research Review*, 53(3), 561-582.

Dalam konteks regional, kasus ini juga mencerminkan dinamika politik di Amerika Latin, di mana isu-isu seperti kudeta, pemilu yang dipertanyakan legitimasinya, serta pemberian suaka politik menjadi bagian dari realitas politik yang sering terjadi. Kasus Morales memberikan contoh bagaimana hukum diplomatik dapat digunakan oleh negara-negara untuk memperkuat posisi politik mereka di tingkat internasional. Dari sisi hukum nasional Bolivia, terdapat isu mengenai apakah Morales seharusnya menghadapi proses hukum di negaranya sendiri ataukah ia memiliki hak untuk mencari perlindungan di negara lain. Bolivia, sebagai negara yang mengalami transisi kepemimpinan, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa semua mantan pejabat yang diduga melakukan pelanggaran hukum dapat menghadapi sistem peradilan yang berlaku⁵. Hal ini menimbulkan dilema hukum antara prinsip kedaulatan negara dan prinsip perlindungan internasional.⁶

Kajian ini juga akan menyoroti peran organisasi internasional, seperti Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam menyikapi situasi yang berkembang di Bolivia. OAS, misalnya, telah menyatakan bahwa pemilu yang dimenangkan Morales mengalami kecurangan, sementara PBB menyoroti perlunya penyelesaian damai atas krisis politik yang terjadi. Peran organisasi internasional ini penting dalam memahami bagaimana hukum diplomatik diterapkan dalam situasi yang melibatkan pemimpin politik yang mengalami pengasingan⁷. Dalam analisis ini, pendekatan hukum diplomatik yang akan digunakan meliputi tinjauan terhadap instrumen hukum internasional, praktik negara-negara dalam memberikan suaka politik, serta yurisprudensi yang relevan. Kajian terhadap praktik suaka politik di Amerika Latin juga akan menjadi bagian penting dalam memahami pola dan dinamika yang terjadi dalam kasus Morales.

Lebih lanjut, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum diplomatik, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap individu yang menghadapi ancaman politik. Dengan menganalisis kasus Morales, kajian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai bagaimana hukum internasional dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pengasingan politik di masa mendatang. Sebagai kesimpulan, kajian mengenai analisis hukum diplomatik dalam kasus pengasingan dan suaka politik Evo Morales tahun 2019 memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam memahami bagaimana hukum internasional beroperasi dalam konteks politik yang kompleks. Studi ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari pemberian suaka politik, serta bagaimana negara-negara dapat menyeimbangkan antara

⁵ Villalón, R. A. (2020). Bolivia's 2019 Crisis: A Study of the Political, Legal, and Diplomatic Dimensions of Morales's Resignation and Asylum. *International Politics and Diplomacy*, 32(1), 14-30.

⁶ Muhaimin Zulhair Achsin, "Keruntuhan Rezim Evo Morales di Bolivia," *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 5, No. 1 (2020): 153-172. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/346521808_Keruntuhan_Rezim_Evo_Morales_di_Bolivia

⁷ Romero, R. (2020). Diplomatic Protection and Political Asylum in Latin America: A Comparative Analysis of Bolivia's Crisis. *Latin American Law Review*, 11(2), 77-92.

prinsip kedaulatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi yang melibatkan pemimpin politik yang mengalami pengasingan.⁸

Pemberian suaka politik oleh Meksiko kepada mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, pada tahun 2019 menimbulkan polemik internasional yang menyentuh aspek hukum internasional dan hak asasi manusia. Tindakan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kewenangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang dianggap mengalami penganiayaan politik, serta bagaimana tindakan tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi tentang Status Pengungsi. Selain itu, urgensi penelitian ini juga terletak pada penelusuran dasar kemanusiaan yang dijadikan landasan oleh Meksiko, yang dikaitkan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan hukum internasional terhadap tindakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales pada tahun 2019?
2. Bagaimana dasar kemanusiaan yang digunakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales dan bagaimana relevansinya dengan perlindungan hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif dalam menganalisis dinamika hubungan internasional dalam kasus suaka politik Evo Morales.⁹ Penelitian ini fokus pada analisis hukum internasional terkait suaka politik yang diberikan kepada Evo Morales oleh Meksiko pada tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan analisis konten terhadap peraturan hukum internasional yang relevan, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer berupa teks-teks hukum internasional, dokumen resmi pemerintah, serta keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan kasus suaka politik. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, jurnal hukum, dan kajian akademis yang membahas isu suaka politik dan hak asasi manusia dalam konteks internasional. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar-dasar hukum yang mendasari tindakan Meksiko serta relevansi tindakan tersebut dengan perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional.

⁸ Janardana Putri & I Made Budi Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 295–318. Diakses melalui: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/595>

⁹ Della Porta, D., & Keating, M. (2008). *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge University Press.

PEMBAHASAN

A. Pandangan hukum internasional terhadap tindakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales pada tahun 2019

Pemberian suaka politik oleh Meksiko kepada Evo Morales pada tahun 2019 memunculkan diskursus penting dalam ranah hukum internasional, khususnya mengenai legalitas dan justifikasi dari tindakan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi ancaman politik. Evo Morales, yang kala itu menjabat sebagai Presiden Bolivia, mengundurkan diri dari jabatannya menyusul tekanan politik dan militer serta gelombang unjuk rasa yang dituduhkan sebagai hasil kecurangan pemilu. Situasi ini memicu kekacauan politik di Bolivia, di mana Morales kemudian mencari perlindungan ke negara lain. Meksiko dengan sigap merespons dengan memberikan suaka politik kepada Morales, yang menjadi sorotan internasional dan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai negara di kawasan Amerika Latin.¹⁰

Dalam konteks hukum internasional, suaka politik merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing yang mengalami penganiayaan, penindasan, atau ancaman terhadap hak-hak dasarnya di negara asalnya. Meskipun suaka politik tidak secara eksplisit diatur dalam banyak instrumen hukum internasional secara rinci, praktik ini sudah menjadi bagian dari norma internasional yang diakui sebagai hak negara yang berdaulat. Hal ini ditekankan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penganiayaan.

Tindakan Meksiko dalam memberi suaka kepada Evo Morales dapat dilihat sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip dalam DUHAM tersebut, yang menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, Meksiko berkewajiban untuk melindungi siapa pun yang menghadapi risiko penganiayaan atau perlakuan tidak manusiawi, terlebih ketika situasi politik di Bolivia menunjukkan potensi represif terhadap Morales dan para pendukungnya. Dalam hal ini, suaka diberikan bukan atas dasar keberpihakan politik, melainkan sebagai respons terhadap ancaman terhadap hak hidup dan kebebasan pribadi Morales. Legalitas tindakan Meksiko juga diperkuat oleh prinsip kemanusiaan dalam hukum internasional, yaitu prinsip yang mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya penderitaan terhadap manusia, khususnya dalam kondisi konflik atau krisis politik. Prinsip ini bersifat jus cogens atau norma imperatif, yang mengikat seluruh negara dan tidak boleh diabaikan, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Oleh karena itu, keputusan Meksiko untuk memberikan suaka politik kepada

¹⁰ Martínez, A. (2020). International Law and Sovereignty: The Case of Bolivia's Political Crisis and the Role of Asylum in 2019. *Journal of International Law and Politics*, 52(4), 671-690.

Morales dapat dibenarkan dari perspektif kewajiban moral dan hukum internasional untuk melindungi martabat manusia.¹¹

Selain itu, pemberian suaka juga sejalan dengan Prinsip Sovereign Discretion dalam hukum internasional, di mana setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang akan diberikan perlindungan di wilayahnya, termasuk pemberian suaka politik. Ini berarti Meksiko secara hukum berhak untuk memberikan suaka tanpa harus meminta persetujuan negara asal orang yang diberi suaka, selama tindakannya tidak bertentangan dengan ketentuan internasional lain yang berlaku. Dengan kata lain, tindakan Meksiko tidak melanggar hukum internasional selama tidak disertai dengan intervensi langsung terhadap urusan domestik Bolivia. Meksiko juga mendasarkan keputusannya pada doktrin tradisional Amerika Latin tentang suaka, di mana praktik pemberian suaka politik sudah lama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri negara-negara kawasan tersebut. Doktrin ini mengakui bahwa dalam situasi ketidakstabilan politik, pemimpin atau tokoh politik dapat diberikan suaka untuk mencegah konflik lebih lanjut dan menjaga stabilitas kawasan. Bahkan jika Konvensi Caracas tidak digunakan dalam penelitian ini, konteks budaya hukum di Amerika Latin mendukung tindakan Meksiko sebagai bentuk solidaritas kawasan dalam merespons krisis politik.¹²

Perlu juga dicatat bahwa hukum internasional tidak mengenal larangan mutlak terhadap pemberian suaka politik, kecuali jika individu yang bersangkutan terbukti melakukan kejahatan berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus Evo Morales, tidak ada bukti hukum internasional yang menyatakan bahwa ia terlibat dalam kejahatan semacam itu. Tuduhan terhadapnya lebih bersifat politis dan administratif, yang justru memperkuat alasan untuk menerima permohonan suaka politik. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum internasional yang sah untuk menolak tindakan Meksiko. Dari sisi kerangka hukum HAM regional, seperti yang diatur dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (Pact of San José, 1969), negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas kehidupan, kebebasan pribadi, dan integritas moral seseorang. Meksiko sebagai salah satu negara anggota telah berkomitmen terhadap perjanjian ini. Maka, tindakan pemberian suaka dapat pula dilihat sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban internasional yang telah mereka adopsi dalam sistem hukum nasionalnya.¹³

Selain kerangka hukum formal, tindakan Meksiko juga sejalan dengan nilai-nilai solidaritas internasional dan prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks global yang menempatkan perlindungan terhadap individu sebagai nilai utama, negara-negara semakin diharapkan untuk tidak bersikap pasif terhadap penderitaan politik yang menimpa seseorang. Justru tindakan Meksiko dapat dianggap sebagai bentuk kepemimpinan moral internasional, yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal HAM tanpa memandang latar belakang ideologi atau tekanan politik

¹¹ Dominicus Enjang Triprasaja, "Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Kuba di Tengah Krisis Amerika Latin," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1 (2017): 97–106. Diakses melalui: <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi2617922d22full.pdf>

¹² Organization of American States (OAS). (2019). OAS Report on Bolivia's 2019 Election. OAS.

¹³ Muhaimin Zulhair Achsin, "Keruntuhan Rezim Evo Morales di Bolivia," *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 5, No. 1 (2020): 153–172. Diakses melalui: <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/224>

internasional. Namun demikian, tindakan Meksiko tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menganggap bahwa pemberian suaka kepada Morales berpotensi memicu ketegangan politik dan memperburuk hubungan bilateral antara Meksiko dan Bolivia. Meski begitu, pandangan hukum internasional tetap mengakui bahwa negara pemberi suaka tidak dapat dipaksa atau dihukum secara hukum hanya karena menjalankan kebijakan suaka, selama tindakan itu tidak melibatkan pelanggaran lain seperti penghasutan atau pemberian bantuan militer kepada pihak oposisi.

Dalam forum internasional, tidak ada lembaga peradilan yang mengadili secara langsung¹⁴ tindakan negara dalam memberikan suaka politik, kecuali ada pelanggaran yang melibatkan yurisdiksi internasional tertentu. Ini memperkuat fakta bahwa tindakan pemberian suaka politik secara prinsip bersifat legal, selama berlandaskan pada prinsip perlindungan HAM dan tidak digunakan untuk tujuan subversif atau agresif terhadap negara lain.¹⁵ Perlu ditekankan bahwa hukum internasional saat ini berkembang ke arah yang lebih humanistik, di mana perlindungan terhadap individu mendapat tempat yang lebih besar dibanding sekadar kedaulatan negara. Oleh karena itu, tindakan Meksiko merupakan refleksi dari transformasi paradigma hukum internasional yang tidak lagi hanya fokus pada negara sebagai aktor utama, tetapi juga pada perlindungan terhadap manusia sebagai subjek utama.¹⁶

Selain melindungi individu, pemberian suaka juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik lebih lanjut, khususnya dalam situasi di mana keberadaan seorang tokoh politik di negaranya sendiri justru dapat memicu kekerasan, penganiayaan, atau bahkan perang saudara. Dalam konteks ini, Meksiko tidak hanya menjalankan kewajiban moral, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas kawasan, yang merupakan salah satu tujuan utama hukum internasional.¹⁷ Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pandangan hukum internasional secara umum, tindakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales tahun 2019 adalah sah secara hukum dan etis secara moral. Langkah ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, asas kemanusiaan, dan kewajiban internasional negara terhadap individu yang menghadapi penganiayaan politik. Pemberian suaka tersebut bukanlah bentuk intervensi, melainkan manifestasi dari komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar utama dari sistem hukum internasional modern.

Dalam kerangka hukum internasional, hak kekebalan diplomatik umumnya diberikan kepada pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugas resmi di negara penerima, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961, khususnya Pasal 29 hingga Pasal 31. Kekebalan ini memberikan perlindungan terhadap penahanan, penuntutan pidana, dan kewajiban peradilan sipil di negara tempat ia bertugas. Dalam kasus Evo Morales, meskipun ia telah

¹⁴ Muhaimin Zulhair Achsin, "Keruntuhan Rezim Evo Morales di Bolivia," *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 5, No. 1 (2020): 153–172. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/346521808_Keruntuhan_Rezim_Evo_Morales_di_Bolivia

¹⁵ Malkin, E. (2019). Evo Morales's Resignation: A Crisis in Bolivia. *The New York Times*.

¹⁶ Ruhl, C. H. (2018). The Political and Legal Dynamics of Asylum in Latin America. *Latin American Research Review*, 53(3), 561-582.

¹⁷ Ibid

mengundurkan diri dari jabatan Presiden Bolivia, kehadirannya di Kedutaan Besar Meksiko di Bolivia selama masa permohonan suaka menunjukkan penerapan prinsip kekebalan yang menyerupai *inviolability*, yang biasa diterapkan dalam konteks perlindungan diplomatik. Meksiko, dalam kapasitasnya sebagai negara pemberi suaka, menempatkan Morales di bawah perlindungan ruang diplomatik yang pada dasarnya tidak boleh diganggu oleh aparat negara tuan rumah, sesuai dengan prinsip inviolabilitas misi diplomatik.¹⁸

Hak kekebalan diplomatik tidak secara otomatis berlaku kepada individu yang bukan bagian dari misi diplomatik resmi, termasuk individu yang sedang mencari suaka seperti Evo Morales. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Morales lebih tepat dikaitkan dengan prinsip *asylum in diplomatic premises* yang kerap dipraktikkan di kawasan Amerika Latin. Dalam konteks ini, praktik tersebut mendapatkan pengakuan melalui Konvensi tentang Suaka Diplomatik (Caracas, 1954), meskipun tidak semua negara termasuk Bolivia dan Meksiko adalah pihak dalam konvensi ini. Namun secara *customary*, kawasan Amerika Latin mengakui adanya praktik perlindungan sementara di kedutaan sebagai bagian dari sistem perlindungan HAM regional. Dalam hal ini, kehadiran Morales di Kedutaan Meksiko mencerminkan bentuk perlindungan non-formal yang memiliki aspek kekebalan fungsional sementara dari intervensi otoritas Bolivia, selama proses pemindahan ke wilayah Meksiko berlangsung.¹⁹

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Morales bukan pejabat diplomatik yang secara sah memperoleh hak kekebalan diplomatik penuh, **negara Meksiko menggunakan prinsip-prinsip kekebalan tempat diplomatik dan asas non-intervensi** untuk melindungi integritas individu yang berada di bawah ancumannya. Perlindungan ini dapat dipandang sebagai bentuk *penafsiran progresif* terhadap hak kekebalan diplomatik dalam rangka menjamin hak atas suaka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 DUHAM dan Prinsip Humanitarian Internasional. Dengan demikian, tindakan Meksiko dapat dipahami sebagai kombinasi antara hak prerogatif diplomatik negara, perlindungan kemanusiaan, dan prinsip non-refoulement, yang secara keseluruhan tidak bertentangan dengan hukum internasional publik, selama tidak disertai tindakan provokatif atau agresif terhadap negara penerima suaka.

B. Dasar kemanusiaan yang digunakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales dan bagaimana relevansinya dengan perlindungan hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM

Pemberian suaka politik oleh Meksiko kepada Evo Morales pada tahun 2019 tidak hanya merupakan tindakan politik luar negeri, tetapi juga memiliki dasar kuat dari sisi kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Tindakan tersebut berakar pada komitmen Meksiko terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan universal sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hak asasi

¹⁸ Rudy Budiono, *Kebijakan Luar Negeri Bolivia di Era Evo Morales dalam Upaya Melepaskan Diri dari Ketergantungan terhadap Sistem Kapitalisme Global*, Universitas Pelita Harapan, 2013. Diakses melalui: <http://repository.uph.edu/811/OneSearch>

¹⁹ Miftakhul Yazid Fuadi, *Strategi Komunikasi Politik Evo Morales: Optimalisasi Fungsi Public Relations Guna Meningkatkan Citra Diri dalam Bingkai Pemilihan Presiden Bolivia*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Diakses melalui: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5692/>

manusia internasional, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. DUHAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan, serta hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan.

Salah satu dasar kemanusiaan utama yang digunakan Meksiko dalam memberikan suaka kepada Evo Morales adalah Pasal 14 ayat (1) DUHAM, yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negeri lain dari penganiayaan." Pasal ini memberikan legitimasi moral dan hukum terhadap tindakan Meksiko, karena Morales dianggap sebagai individu yang menghadapi risiko nyata terhadap keselamatan dirinya akibat tekanan politik yang tidak wajar setelah pengunduran dirinya sebagai Presiden Bolivia. Tindakan penganiayaan terhadap tokoh politik yang dianggap sudah tidak sejalan dengan pemerintahan transisi atau kekuatan militer merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam DUHAM.²⁰

Prinsip kemanusiaan juga tercermin dalam upaya Meksiko untuk mencegah risiko lebih lanjut terhadap hak hidup Morales. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hak hidup termasuk hak yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat politik. Dengan memberikan suaka, Meksiko secara langsung menjalankan prinsip perlindungan atas hak hidup, yang merupakan hak paling fundamental dalam sistem hukum internasional. Langkah ini tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk intervensi, melainkan sebagai pelaksanaan tanggung jawab moral dan hukum untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari potensi kekerasan atau pembunuhan politik.

Selain hak hidup, tindakan Meksiko juga berhubungan erat dengan perlindungan terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Morales pada saat itu menghadapi potensi penahanan, penindasan, dan intimidasi, baik dari aparat negara maupun kelompok masyarakat yang bertindak atas dasar politik. Berdasarkan DUHAM Pasal 3, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan diri." Maka, ketika negara asalnya gagal menjamin ketiga hak tersebut, negara lain seperti Meksiko memiliki justifikasi kemanusiaan untuk memberikan perlindungan sementara melalui mekanisme suaka. Aspek lain yang juga penting adalah prinsip non-refoulement, yang meskipun lebih banyak dibahas dalam konteks pengungsi, tetap relevan dalam pembahasan suaka politik. Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh mengembalikan seseorang ke negara asalnya jika orang tersebut berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Meskipun DUHAM tidak secara eksplisit mencantumkan istilah "non-refoulement", namun prinsip tersebut merupakan turunan dari perlindungan terhadap hak untuk tidak disiksa (Pasal 5 DUHAM). Maka, jika Morales dikembalikan ke Bolivia dalam situasi yang membahayakan dirinya,

²⁰ Finkel, A., & High, D. (2017). Human Rights and Political Asylum in Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 49(4), 883-905.

Meksiko akan melanggar prinsip dasar ini, sehingga pemberian suaka menjadi pilihan yang etis dan legal secara internasional.²¹

Langkah Meksiko juga menunjukkan bahwa negara tersebut memegang teguh prinsip kemanusiaan universal (universal humanity), yaitu gagasan bahwa hak asasi manusia adalah milik setiap individu tanpa memandang status politik, kewarganegaraan, atau keyakinan ideologisnya. Morales, meskipun adalah tokoh kontroversial secara politik, tetap dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Dengan memberikan suaka, Meksiko tidak mendukung agenda politik tertentu, tetapi menunjukkan keberpihakannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap individu dari potensi penganiayaan. Selain bersumber dari DUHAM, Meksiko juga mengacu pada prinsip kemanusiaan dalam hukum kebiasaan internasional, yang berlaku meskipun tidak selalu tertulis. Negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada siapa pun yang menghadapi bahaya, tanpa harus menunggu adanya keputusan resmi dari lembaga internasional. Dalam banyak praktik internasional, negara yang memberikan suaka politik telah dianggap memainkan peran sebagai pelindung hak asasi manusia secara langsung di saat sistem domestik tidak lagi mampu atau tidak mau menjalankannya.

Secara historis, Meksiko memiliki tradisi panjang dalam memberikan suaka kepada individu yang menghadapi ancaman politik, termasuk pada masa Perang Dunia II dan masa kediktatoran di Amerika Latin. Tradisi ini menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan bukan hanya berdasar pada kewajiban hukum, tetapi juga pada budaya konstitusional Meksiko sendiri yang menempatkan hak asasi manusia sebagai nilai utama dalam kebijakan luar negerinya. Konstitusi Meksiko bahkan memasukkan prinsip perlindungan HAM secara eksplisit sebagai dasar tindakan negaranya.²³ Relevansi tindakan ini terhadap DUHAM juga terletak pada upaya Meksiko untuk menghormati hak atas pengadilan yang adil dan proses hukum. Dalam situasi politik Bolivia saat itu, tidak ada jaminan bahwa Morales akan mendapatkan perlakuan yang adil apabila tetap tinggal di negaranya. DUHAM Pasal 10 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak, atas dasar persamaan penuh, untuk didengar secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak." Karena Meksiko menilai kondisi Bolivia tidak mampu memenuhi hal ini, maka pemberian suaka merupakan bentuk perlindungan atas hak tersebut.

Meksiko juga bertindak berdasarkan asas prevensi pelanggaran HAM, yaitu prinsip bahwa negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia jika ada indikasi nyata bahwa pelanggaran tersebut akan terjadi. Dalam kasus Morales, ancaman terhadap dirinya bukanlah spekulatif, tetapi berdasarkan dinamika politik dan tindakan militer serta tekanan yang terjadi secara nyata di Bolivia. Dengan demikian, tindakan preventif melalui suaka dapat dianggap

²¹ Villalón, R. A. (2020). Bolivia's 2019 Crisis: A Study of the Political, Legal, and Diplomatic Dimensions of Morales's Resignation and Asylum. *International Politics and Diplomacy*, 32(1), 14-30.

²² Martínez, A. (2020). International Law and Sovereignty: The Case of Bolivia's Political Crisis and the Role of Asylum in 2019. *Journal of International Law and Politics*, 52(4), 671-690.

²³ Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press. Hlm 74

sebagai implementasi langsung dari kewajiban HAM yang proaktif. Tindakan Meksiko juga memberikan pesan penting secara internasional bahwa perlindungan HAM tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau kepentingan strategis jangka pendek. Meski mendapat kecaman dari beberapa negara atau pihak tertentu, Meksiko tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diakuinya dalam hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus tetap berdiri di atas pertimbangan moral dan hukum, bukan hanya strategi diplomatik atau politik kekuasaan.²⁴

Dengan memberikan suaka, Meksiko juga secara tidak langsung memperkuat peran Deklarasi Universal HAM sebagai instrumen yang hidup dan relevan dalam situasi nyata. DUHAM bukan sekadar dokumen normatif, tetapi menjadi pedoman praktis yang harus diterapkan dalam kebijakan luar negeri negara-negara yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Suaka politik kepada Morales menjadi bukti konkret bagaimana DUHAM diterjemahkan dalam tindakan negara untuk melindungi hak individu yang terancam. Akhirnya, pemberian suaka ini juga menjadi cerminan dari solidaritas internasional dalam perlindungan individu, di mana negara-negara diharapkan untuk saling membantu dalam menjaga keselamatan dan kebebasan manusia. Dalam sistem hukum internasional modern, negara tidak bisa lagi bersikap pasif terhadap penderitaan yang dialami individu di negara lain. Oleh karena itu, tindakan Meksiko sangat relevan dengan semangat dan isi Deklarasi Universal HAM yang menekankan pentingnya kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar kemanusiaan yang digunakan oleh Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales sangat kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam DUHAM. Tindakan ini bukan hanya sah secara hukum internasional, tetapi juga etis dari sisi moral dan kemanusiaan. Melalui langkah tersebut, Meksiko menunjukkan kepemimpinannya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan menunjukkan bahwa dalam dunia internasional yang semakin kompleks, keberpihakan kepada martabat manusia tetap menjadi fondasi utama dari hubungan antarnegara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales pada tahun 2019 mencerminkan implementasi prinsip-prinsip hukum internasional yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, meskipun terdapat pertentangan dengan beberapa prinsip politik internasional lainnya, seperti non-intervensi. Dalam konteks hukum internasional, tindakan Meksiko sah berdasarkan ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 14 yang mengakui hak individu untuk mencari dan menikmati suaka di negara

²⁴ González, C. (2023). The Interplay of Sovereignty and Human Rights in Asylum Decisions: Bolivia and Mexico. *Human Rights Review*, 24(3), 315-332.

²⁵ Clément, B. (2019). The Role of the Organization of American States in Latin American Politics. *Latin American Politics and Society*, 61(2), 1-22.

lain dari penganiayaan. Pemberian suaka politik oleh Meksiko kepada Evo Morales juga berkaitan dengan prinsip kekebalan diplomatik, terutama jika perlindungan diberikan di dalam kedutaan Meksiko. Dalam hukum internasional, sebuah kedutaan dianggap memiliki kekebalan, artinya aparat negara lain, termasuk negara tempat kedutaan berada, tidak bisa masuk atau melakukan penangkapan di sana. Meski Morales bukan diplomat, selama ia berada di dalam kedutaan, ia tetap terlindungi oleh aturan ini. Jadi, tindakan Meksiko bukan hanya sah secara hukum dan moral, tetapi juga dilindungi oleh aturan tentang kekebalan diplomatik, selama digunakan dengan tujuan kemanusiaan dan bukan untuk menyembunyikan pelaku kejahatan serius.

Dasar kemanusiaan yang digunakan Meksiko dalam memberikan suaka politik kepada Evo Morales berakar pada komitmen negara tersebut terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terutama yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan perlindungan terhadap individu dari penganiayaan. Meksiko memberikan suaka kepada Morales dengan alasan untuk melindungi hak-hak dasar yang terancam akibat situasi politik di Bolivia, dimana Morales menghadapi ancaman kekerasan dan penganiayaan. Tindakan ini juga sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 14 DUHAM yang menjamin hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan diri, serta hak untuk mencari suaka. Meksiko mengimplementasikan prinsip kemanusiaan ini sebagai respons terhadap ancaman yang dihadapi Morales, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang politik atau ideologis individu tersebut. Secara keseluruhan, tindakan Meksiko menegaskan relevansi DUHAM dalam praktek hukum internasional yang menempatkan perlindungan terhadap martabat dan keselamatan individu sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri.

B. Saran

Untuk menghindari eskalasi ketegangan diplomatik akibat pemberian suaka politik, negara-negara yang terlibat harus mengedepankan dialog diplomatik yang lebih fleksibel serta mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Selain itu, komunitas internasional, termasuk organisasi regional seperti Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi penyelesaian konflik agar tidak berujung pada polarisasi ideologis yang semakin tajam. Diperlukan juga mekanisme yang lebih jelas dalam penerapan hukum suaka politik agar tidak menjadi alat politik yang justru memperburuk hubungan antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

Achsin, Muhaimin Zulhair. "Keruntuhan Rezim Evo Morales di Bolivia." *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 5, No. 1 (2020): 153–172. Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/346521808_Keruntuhan_Rezim_Evo_Morales_di_Bolivia.

- Budiono, Rudy. "Kebijakan Luar Negeri Bolivia di Era Evo Morales dalam Upaya Melepaskan Diri dari Ketergantungan terhadap Sistem Kapitalisme Global." Universitas Pelita Harapan, 2013. Diakses melalui: <http://repository.uph.edu/811/OneSearch>.
- Clément, B. "The Role of the Organization of American States in Latin American Politics." *Latin American Politics and Society*, 61(2) (2019): 1-22.
- Della Porta, D., & Keating, M. *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*. Cambridge University Press, 2008.
- Finkel, A., & High, D. "Human Rights and Political Asylum in Latin America." *Journal of Latin American Studies*, 49(4) (2017): 883-905.
- Fuadi, Miftakhul Yazid. *Strategi Komunikasi Politik Evo Morales: Optimalisasi Fungsi Public Relations Guna Meningkatkan Citra Diri dalam Bingkai Pemilihan Presiden Bolivia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Diakses melalui: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5692/>.
- González, C. "The Interplay of Sovereignty and Human Rights in Asylum Decisions: Bolivia and Mexico." *Human Rights Review*, 24(3) (2023): 315-332.
- Janardana Putri, & I Made Budi Arsika. "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 295-318. Diakses melalui: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/595>.
- Malkin, E. "Evo Morales's Resignation: A Crisis in Bolivia." *The New York Times*, 2019.
- Martínez, A. "International Law and Sovereignty: The Case of Bolivia's Political Crisis and the Role of Asylum in 2019." *Journal of International Law and Politics*, 52(4) (2020): 671-690.
- Organization of American States (OAS). *OAS Report on Bolivia's 2019 Election*. OAS, 2019.
- Putri, Janardana, & Arsika, I Made Budi. "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 295-318. Diakses melalui: <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/595>.
- Romero, R. "Diplomatic Protection and Political Asylum in Latin America: A Comparative Analysis of Bolivia's Crisis." *Latin American Law Review*, 11(2) (2020): 77-92.
- Ruhl, C. H. "The Political and Legal Dynamics of Asylum in Latin America." *Latin American Research Review*, 53(3) (2018): 561-582.

Shaw, M. N. *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press, 2017.

Villalón, R. A. "Bolivia's 2019 Crisis: A Study of the Political, Legal, and Diplomatic Dimensions of Morales's Resignation and Asylum." *International Politics and Diplomacy*, 32(1) (2020): 14-30.